

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrianus, M. (2013). *Diskresi Kepolisian: Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*. Kompolnas.
- Ahmad Asra, R. (2019). *Hukum Acara Pidana*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, A. (2017). *Menguak Tabir Hukum*. Kencana.
- Amrani, H. (2015). *Hukum Pidana Pencucian Uang*. UII Press.
- Apriyanto, E. (2016). Penerapan Restorative Justice sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Polrestabes Semarang. *Jurnal Spektrum Hukum*, 13(1), 55–72.
- Aribowo, R. (2013). *Peran Penyidik Satuan Reskrim Polres Samosir Dalam Penanganan Penyidik Tindak Pidana Penganiayaan Pada Wilayah Hukum Polres Samosir*. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Domisili Akpol Semarang.
- Aribowo, R. (2019). Penerapan Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan. *USU Law Journal*, 7(4), 59–73.
- Busro, A. (2012). *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*. Pohon Cahaya.
- Fridoki, O., & Syahrin, A. (2022). Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Di Polrestabes Medan (*The Implementation of Restorative Justice in The Settlement of Criminal Crimes of Fraud and Embezzlement at the Polrestabes Medan*) Inst. *Res Nullius Law Journal*, 4(1), 42–56.
- Harun, B. (2010). *Prosedur Gugatan Perdata*. Pustaka Yustisia.
- Hatta, M. (2010). *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*. Liberty.
- Herzein Inlandsch Reglement (HIR)*.
- I Made Ngurah Adi Kusumadewa, Sugiartha, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2022). Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Pencucian Uang Pada PT. Purnama Kertasindo Jakarta Timur. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 178–183. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4417.178-183>

- Kasih Kalpika, D. (2018). Efektivitas Pemberian Restitusi Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Idea Hukum*, 4(1), 836–845.
- Keputusan Jaksa Agung Nomor 518/A/J.A/11/2001 Tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Nomor 132/JA/11/1994 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kumendong Jh, W. (2017). Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan. *Jurnal hukum Unsrat*, 23(9), 53–62.
- Kurnia, P. (2015). Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban. *GEMA*, XXVII(49), 1497–1508.
- Lestari, R. (2017). Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 217–237.
- Maksanah, U. (2020). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. LOGOZ PUBLISHING.
- Mertokusumo, S. (2018). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Molana Haris, D. (2020). Sepanjang 2020, Kasus Penipuan-Pencurian Tertinggi Terjadi di Medan. *detikNews*, 1. <https://news.detik.com/berita/d-5316682/sepanjang-2020-kasus-penipuan-pencurian-tertinggi-terjadi-di-medan>
- Muhammad, A. (2015). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, I. A. dan I. (2019). *Hukum Pembuktian*. UNPAM PRESS.
- Muwahid. (2017). Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif. *Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 7(1), 230–245.
- Najih dan Soimin, M. (2012). *Pengantar Hukum Indonesia* (Cetakan Pe). Setara Press.
- Njoto, L. G. dan B. (2018). *Hukum Money Laundering Pencucian Uang dalam Dimensi*

*Kepatuhan*. Setara Press.

Palandung G, J. (2014). Pelimpahan Perkara Pidana Ke Pengadilan Negeri Dengan Acara Pemeriksaan Singkat. *Lex et Societatis*, II(7), 84–95.

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Prodjodikoro, W. (2012). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. PT Refika Aditama.

Putri, F. L. E. dan S. A. (2020). *Hukum Acara Perdata*. PT Refika Aditama.

Putri Prima, R. (2018). Pemeriksaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kelas 1B Bukittinggi. *Soumatra Law Review*, I(1), 176–197.

Rahmadi, T. (2011). *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*. PT Raja Grafindo Persada.

*Rechtreglement voor de Buitengewesteb (Rbg)*.

Rorong, O. (2017). Peran Penyidik Polri Dalam Pelimpahan Berkas Perkara Pada Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. *Lex Crimen*, VI(4), 45–53.

Sabda Setiadi Nyoman, I. (2015). Syarat Materil dan Formal Gugatan Rekonvensi Dalam Perkara Perdata. *Lex Privatum*, III(2), 70–77.

Saragi, M. (2014). Litigasi dan NonLitigasi untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis dalam Rangka Pengembangan Investasi di Indonesia. *E-Journal Graduate Unpar*, I(2), 54–73.

Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara- Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Maresekal Suryadarma*, 11(1), 53–70.

- Slamet Redjeki, S. (2013). Tuntutan Ganti Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi. *Lex Journalica*, 10(2), 107–120.
- Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- Suryani, M. (2022). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Binary Option Pada Platform Binomo. *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas*, 1(2), 18–30.
- Suwiknyo, E. (2022). Transaksi “Gelap” Kasus Penipuan Melonjak 98,8 Persen, Imbas Kasus Crazy Rich. *Bisnis.com*, 1. <https://kabar24.bisnis.com/read/20220328/16/1515829/transaksi-gelap-kasus-penipuan-melonjak-988-persen-imb-askas-crazy-rich>.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemeberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.